

PROVINSI PAPUA TENGAH		SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D) Nomor: 37.00/04.0/000246/LS/9.03.0.00.0.00.22.0000/P.03/12/2023													
Nomor SPM : 37.00/03.0/000283/LS/9.03.0.00.0.00.22.0000/P.03/12/2023 Tanggal : 20 Desember 2023 SKPD : MAJELIS RAKYAT PAPUA		Dari : Kuasa BUD Tahun Anggaran : 2023													
<p>Bank Pengirim : Bank Papua Hendaklah mencairkan / memindahbukukan dari baki Rekening Nomor 30001021111122 Uang sebesar Rp170.000.000 (terbilang: seratus tujuh puluh juta rupiah)</p>															
<p>Kepada : TERLAMPIR NPWP : 408253931954000 No. Rekening Bank : 1111111111111111 Bank Penerima : Bank Papua Kepatuhan Untuk : PEMBAYARAN HONORARIUM TENAGA AHLI PERIODE BULAN OKTOBER S/D DESEMBER 2023 A.N. MANASE YOTENI SH. DKK Pagu Anggaran : Rp13.986.791.132 Sumber Dana : 1.2.01.03 Dana Otonomi Khusus</p>															
NO	KODE KEGIATAN	URAIAN													
1	9.02.02.3.01	Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Anggota MRP													
2	9.02.02.3.01.08	Fasilitasi Tugas Pimpinan MRP													
3	5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli													
			Jumlah												
			Rp170.000.000												
Potongan-potongan: <table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Uraian (No. Rekening)</th> <th>Jumlah (Rp)</th> <th>Keterangan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>PPH 21</td> <td>11.500.000</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Jumlah</td> <td>11.500.000</td> </tr> </tbody> </table>				No.	Uraian (No. Rekening)	Jumlah (Rp)	Keterangan	1.	PPH 21	11.500.000		Jumlah			11.500.000
No.	Uraian (No. Rekening)	Jumlah (Rp)	Keterangan												
1.	PPH 21	11.500.000													
Jumlah			11.500.000												
SP2D yang Dibayarkan <table border="1"> <tbody> <tr> <td>Jumlah yang Diminta (Bruto)</td> <td>Rp170.000.000</td> </tr> <tr> <td>Jumlah Potongan</td> <td>Rp11.500.000</td> </tr> <tr> <td>Jumlah Netto</td> <td>Rp158.500.000</td> </tr> <tr> <td>Jumlah yang Dibayarkan</td> <td>Rp170.000.000</td> </tr> </tbody> </table> <p>Uang Sejumlah: seratus tujuh puluh juta rupiah</p>				Jumlah yang Diminta (Bruto)	Rp170.000.000	Jumlah Potongan	Rp11.500.000	Jumlah Netto	Rp158.500.000	Jumlah yang Dibayarkan	Rp170.000.000				
Jumlah yang Diminta (Bruto)	Rp170.000.000														
Jumlah Potongan	Rp11.500.000														
Jumlah Netto	Rp158.500.000														
Jumlah yang Dibayarkan	Rp170.000.000														
		Nabire, 22 Desember 2023, KUSA BENDAHARA UMUM DAERAH PEMERINTAH PROVINSI BPPKAD PAPUA TENGAH MULYAH SUROTO, S.T. NIP. 197402212000121005													
Lembar 1: Bank Yang Ditunjuk Lembar 2: Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Lembar 3: Arsip Kuasa BUD Lembar 4: Pihak Penerima															



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH
BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Jl. Merdeka, Kel. Karang Mulia, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire – Papua Tengah 98811

SKPD

MIRD

Nilai

: 170.000.000

OKSUS

CHECKLIST/PENELITIAN KELENGKAPAN DOKUMEN SP2D-LS

Honorarium/Penghasilan lainnya, Lembur,
dan Biaya Perjalanan Dinas

- Ringkasan SPP-LS;
- Rincian belanja yang diajukan pembayarannya sampai dengan sub rincian obyek;
- Surat Pernyataan PA/KPA bahwa uang yang diminta tidak dipergunakan untuk keperluan selain pembayaran langsung/SPTJM-SPP-LS;
- Pengantar SPM-LS;
- SPM-LS;
- Surat Pernyataan PA/KPA bahwa uang yang diminta tidak dipergunakan untuk keperluan selain pembayaran langsung/SPTJM-SPM-LS
- Surat Pernyataan Verifikasi PPK-SKPD/PPK Unit SKPD;
- SK Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan/Penetapan Jabatan (pada awal pencairan);
- Daftar Penerimaan Honorarium;
- Daftar Potongan & E-biling PPh 21 (apabila ada);
- Surat Tugas/Surat Perintah Tugas;
- Surat Perintah Lembur;
- Daftar Pembayaran Lembur;
- Surat Perintah Perjalanan Dinas;
- Visum SPPD;
- Bukti Tiket, boarding pass Pesawat dan Hotel;
- Kwitansi Bermaterai Penerima SPPD;
- Lembar Verifikasi PPK-SKPD,
- Berkas salinan 2 rangkap dan PDF asli.

Yang memverifikasi

.....
NIP.

Nabire, 21 des. 2023
Mengetahui/Menyetujui
Plt. Kepala Bidang Perbendaharaan

Much Suroto, ST
NIP. 19740221 200012 1 005



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH
MAJELIS RAKYAT PAPUA
Jl. Mandala-Kelurahan Bumi Wonorejo Kabupaten Nabire

Nomor : 000 / 744 / SET / MRP. / 2023
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Sifat : Penting
Hal : Pengantar SPM LS

Nabire 20 Desember 2023

Kepada
Yth . Kepala Bidang Perbendaharaan
BPPKAD Provinsi Papua Tengah

di
N A B I R E

Berdasarkan Peraturan Provinsi Papua Tengah Nomor 10 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, maka kami kirimkan SPM-LS untuk Pembayaran Belanja Honorarium Tenaga Ahli (Bagian Keuangan) Sub Keg. Fasilitasi Tugas Pimpinan MRP (OTSUS BG) untuk keperluan Sekretariat MRP Provinsi Papua Tengah sebagaimana berikut :

No	SPM		Penerima (Pihak Ketiga)	Jumlah yang diminta
	Tanggal SPM	Nomor SPM		
1.	20 Desember 2023	37.00/03.0/000283/ LS/9.03.0.00.0.00.2 2.0000/P.03/12/2023	TERLAMPIR	Rp. 170.000.000

Demikian untuk diketahui dan mohon persetujuannya



Format Dokumen Checklist/Penelitian Kelengkapan SPM-LS

CHECKLIST/PENELITIAN KELENGKAPAN DOKUMEN SPM-LS

SPM-LS Pengadaan Barang dan Jasa

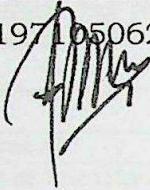
- Ringkasan SPP-LS;
- Rincian belanja yang diajukan pembayarannya sampai dengan sub rincian obyek;
- Surat Pernyataan PA/KPA bahwa uang yang diminta tidak dipergunakan untuk keperluan selain pembayaran langsung/SPTJM-SPP-LS;
- Pengantar SPM-LS;
- SPM-LS;
- Surat Pernyataan PA/KPA bahwa uang yang diminta tidak dipergunakan untuk keperluan selain pembayaran langsung/SPTJM-SPM-LS;
- Surat Pernyataan Verifikasi PPK-SKPD/PPK Unit SKPD;
- Bukti Pembayaran yang Sah (asli bermeterai) Kwitansi yang ditandatangani oleh PA/KPA, PPTK, Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Penerima Pembayaran;
- Bukti pembelian/nota pembelian (*untuk pengadaan/pembelian sampai dengan Rp. 10.000.000,-*);
- Bukti pembelian/nota pembelian dan surat pesanan (*untuk pengadaan diatas Rp. 10.000.000,- sampai dengan Rp.50.000.000,-*);
- Berita Acara hasil pelelangan ;
- RAB;
- Faktur Barang ;
- Faktur Tagihan;
- Dokumentasi Barang ;
- Pembayaran Dokumen Lelang apabila lewat proses lelang ;
- Berita Acara Hasil Pemeriksaan barang/hasil pekerjaan oleh ASET ;
- Surat Permohonan Pembayaran;
- Berita Acara Pembayaran;
- Jaminan pelaksanaan apabila nilai kontrak lebih dari 200juta ;
- Berita Acara serah terima barang/hasil pekerjaan (100%);
- Surat Perintah Kerja (SPK) beserta kelengkapannya;
- Surat Perjanjian/Kontrak beserta lampiran-lampirannya;
- Surat Perintah Pengiriman untuk barang;
- Referensi bank;
- Surat Jaminan bank;
- Fotocopy rekening giro bank;
- Fotocopy NPWP/PKP;

- Rekapitulasi Perincian Penggunaan Dana per kode rekening belanja yang diajukan dari SPM dan Perhitungan Pajaknya;
 - BILLING PPh dan PPN;
 - E-faktur pajak;
 - Tanda Bukti Pembayaran Pajak Daerah apabila ada;
- Dinyatakan telah diteliti dan diverifikasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku

PPK-SKPD/PPK Unit SKPD

PENELITI KELENGKAPAN DOKUMEN

Nama : MATILDA MOSE, S.Sos
Tanggal : 20 Desember 2023
NIP : 197105062003122008
Tanda Tangan :



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH
SURAT PERINTAH MEMBAYAR
Langsung (LS)

Tahun Anggaran: 2023	No. SPM: 37.00/03.0/000283/LS/9.03.0.00.0.00.22.0000/P.03/12/2023																		
KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH supaya menerbitkan SP2D kepada: SKPD : MAJELIS RAKYAT PAPUA Bendahara / : TERLAMPIR Pihak Ketiga *) No. Rekening Bank : 1111111111111111 Nama Bank : Bank Papua NPWP : 405253931954000 Dasar Pembayaran : 37.00/01.0/000011/9.03.0.00.0.00.22.0000/P.03/11/2023 Sumber Dana : 1.2.01.03 Dana Otonomi Khusus																			
Untuk Keperluan: PEMBAYARAN HONORARIUM TENAGA AHLI PERIODE BULAN OKTOBER S/D DESEMBER 2023 A.N. MANASE YOTENI SH. DKK PADA SEKRETARIAT MAJELIS RAKYAT PAPUA PROVINSI PAPUA TENGAH SESUAI PERMINTAAN TERLAMPIR (OTSUS BG 1%)																			
Pembebanan pada kode kegiatan <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">KODE KEGIATAN</th> <th style="width: 60%;">URAIAN</th> <th style="width: 25%;">NILAI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3">SPD - 37.00/01.0/000011/9.03.0.00.0.00.22.0000/P.03/11/2023</td> </tr> <tr> <td>9.02.02.3.01</td> <td>Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Anggota MRP</td> <td>Rp170.000.000</td> </tr> <tr> <td>9.02.02.3.01.08</td> <td>Fasilitasi Tugas Pimpinan MRP</td> <td>Rp170.000.000</td> </tr> <tr> <td>5.1.02.02.01.0029</td> <td>Belanja Jasa Tenaga Ahli</td> <td>Rp170.000.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Jumlah</td> <td>Rp170.000.000</td> </tr> </tbody> </table>		KODE KEGIATAN	URAIAN	NILAI	SPD - 37.00/01.0/000011/9.03.0.00.0.00.22.0000/P.03/11/2023			9.02.02.3.01	Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Anggota MRP	Rp170.000.000	9.02.02.3.01.08	Fasilitasi Tugas Pimpinan MRP	Rp170.000.000	5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	Rp170.000.000		Jumlah	Rp170.000.000
KODE KEGIATAN	URAIAN	NILAI																	
SPD - 37.00/01.0/000011/9.03.0.00.0.00.22.0000/P.03/11/2023																			
9.02.02.3.01	Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Anggota MRP	Rp170.000.000																	
9.02.02.3.01.08	Fasilitasi Tugas Pimpinan MRP	Rp170.000.000																	
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	Rp170.000.000																	
	Jumlah	Rp170.000.000																	
Jumlah SPP yang Diminta: Rp170.000.000 <i>(terbilang: seratus tujuh puluh juta rupiah)</i>																			
Nomor dan Tanggal SPP 37.00/02.0/000273/LS/9.03.0.00.0.00.22.0000/P.03/12/2023 tanggal 20-12-2023																			
SPM ini sah apabila telah ditandatangani dan distempel oleh PA/KPA																			

*) coret yang tidak perlu

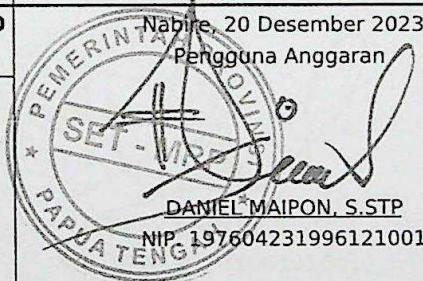
Potongan-potongan:			
No.	Uraian (No. Rekening)	ID Billing	Jumlah
1	PPH 21	028335610115002	Rp11.500.000
			Jumlah Rp11.500.000

Informasi: (Tidak mengurangi jumlah pembayaran SPM)

SPM yang Dibayarkan

Jumlah yang Diminta (Bruto)	Rp170.000.000
Jumlah Potongan	Rp11.500.000
Jumlah Netto	Rp158.500.000
Jumlah yang Dibayarkan	Rp170.000.000

Uang sejumlah: (seratus tujuh puluh juta rupiah)



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH
MAJELIS RAKYAT PAPUA

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK SPM-LS

Nomor: 37.00/03.0/000283/LS/9.03.0.00.0.00.22.0000/P.03/12/2023

Sehubungan dengan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) nomor 37.00/03.0/000283/LS/9.03.0.00.0.00.22.0000/P.03/12/2023 tanggal 20 Desember 2023 yang saya ajukan sebesar Rp170.000.000 (terbilang seratus tujuh puluh juta rupiah) untuk keperluan MAJELIS RAKYAT PAPUA Tahun Anggaran 2023, dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Jumlah Langsung (LS) tersebut di atas akan dipergunakan untuk keperluan guna membiayai kegiatan yang akan akan kami laksanakan sesuai DPA-SKPD.
2. Jumlah Langsung (LS) tersebut tidak akan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang menurut ketentuan yang berlaku harus dilakukan dengan pembayaran lainnya.
3. Bukti-bukti belanja tersebut disimpan di MAJELIS RAKYAT PAPUA sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk keperluan pemeriksaan Internal/Eksternal sebagai Bukti Pertanggungjawaban Keuangan.

Dengan ini, saya menyatakan bertanggung jawab penuh atas segala pengeluaran yang dibayar lunas sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk melengkapi persyaratan pengajuan SPM-LS SKPD kami.

Nabire, 20 Desember 2023

Pengguna Anggaran



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH
MAJELIS RAKYAT PAPUA

SURAT PERNYATAAN
VERIFIKASI KELENGKAPAN DAN KEABSAHAN
DOKUMEN DAN LAMPIRAN SPP-LS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

nama : MATILDA MOSE. S.Sos
NIP : 197105062003122008
jabatan : PPK SKPD

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dokumen dan lampiran Surat Permintaan Pembayaran LS nomor 37.00/02.0/000273/LS/9.03.0.00.0.00.22.0000/P.03/12/2023 tanggal 20 Desember 2023 telah lengkap dan sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Jika di kemudian hari pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini saya buat dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Nabire, 20 Desember 2023
PPK SKPD

MATILDA MOSE. S.Sos
NIP. 197105062003122008

PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH
MAJELIS RAKYAT PAPUA

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK SPP-LS

Nomor: 37.00/02.0/000273/LS/9.03.0.00.0.00.22.0000/P.03/12/2023

Sehubungan dengan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) nomor 37.00/02.0/000273/LS/9.03.0.00.0.00.22.0000/P.03/12/2023 tanggal 20 Desember 2023 yang kami ajukan sebesar Rp170.000.000 (terbilang seratus tujuh puluh juta rupiah) untuk keperluan MAJELIS RAKYAT PAPUA Tahun Anggaran 2023, dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Jumlah Langsung (LS) tersebut di atas akan dipergunakan untuk keperluan guna membiayai kegiatan yang akan kami laksanakan sesuai DPA-SKPD.
2. Jumlah Langsung (LS) tersebut tidak akan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang menurut ketentuan yang berlaku harus dilakukan dengan pembayaran lainnya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk melengkapi persyaratan pengajuan SPP-LS SKPD kami.

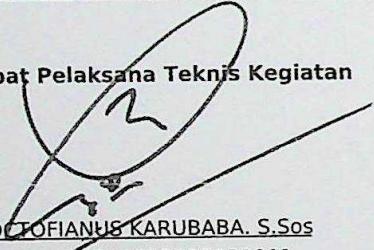
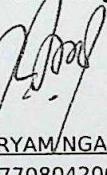
Nabire, 20 Desember 2023

Pengguna Anggaran



PROVINSI PAPUA TENGAH
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP)

Nomor: 37.00/02.0/000273/LS/9.03.0.00.0.00.22.0000/P.03/12/2023

Langsung Barang dan Jasa			
SPP-LS			
1.	Nama SKPD/Unit Kerja	:	MAJELIS RAKYAT PAPUA
2.	Kode dan Nama Sub Kegiatan	:	terlampir
3.	Nama Pengguna Anggaran	:	DANIEL MAIPON, S.STP
4.	Nama PPTK	:	OCTOFIANUS KARUBABA. S.Sos
5.	Nama Bendahara Pengeluaran	:	MARYAM NGANGUN
6.	NPWP Bendahara Pengeluaran	:	405253931954000
7.	Nama Bank	:	Bank Papua
8.	Nomor Rekening Bank	:	9000102000212
9.	Untuk Keperluan	:	PEMBAYARAN HONORARIUM TENAGA AHLI PERIODE BULAN OKTOBER S/D DESEMBER 2023 A.N. MANASE YOTENI SH. DKK PADA SEKRETARIAT MAJELIS RAKYAT PAPUA PROVINSI PAPUA TENGAH SESUAI PERMINTAAN TERLAMPIR (OTSUS BG 1%)
10.	Dasar Pengeluaran	:	SPD nomor: 37.00/01.0/000011/9.03.0.00.0.00.22.0000/P.03/11/2023 tanggal 31-10-2023 Sebesar: Rp170.000.000 (terbilang: seratus tujuh puluh juta rupiah)
No Uraian			
I	SPD		
Tanggal : 31-10-2023	Nomor : 37.00/01.0/000011/9.03.0.00.0.00.22.0000/P.03/11/2023	Rp17.467.781.184	
II SP2D Sebelumnya			
Tanggal : -	Nomor : -	-	
Pada SPP ini ditetapkan lampiran-lampiran yang diperlukan sebagaimana tertera pada daftar kelengkapan dokumen SPP-1			
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan  <u>OCTOFIANUS KARUBABA. S.Sos</u> NIP. 197910232015031001		Nabire, 20 Desember 2023 Bendahara Pengeluaran  <u>MARYAM NGANGUN</u> NIP. 197708042008012025	
			
Lembar Asli : Untuk Pengguna Anggaran/PPK-SKPD Salinan 1 : Untuk Kuasa BUD Salinan 2 : Untuk Bendahara Pengeluaran Salinan 3 : Untuk Arsip Bendahara Pengeluaran			

PROVINSI PAPUA TENGAH
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP)
Nomor: 37.00/02.0/000273/LS/9.03.0.00.0.00.22.0000/P.03/12/2023
Tahun Anggaran: 2023

RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN

No	Kode Rekening	Uraian	Jumlah
NOMOR SPD - 37.00/01.0/000011/9.03.0.00.0.00.22.0000/P.03/11/2023			
9.02.02.3.01 Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Anggota MRP			
9.02.02.3.01.08 Fasilitasi Tugas Pimpinan MRP			
1.	5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	Rp170.000.000

TOTAL : Rp170.000.000

Terbilang: seratus tujuh puluh juta rupiah.



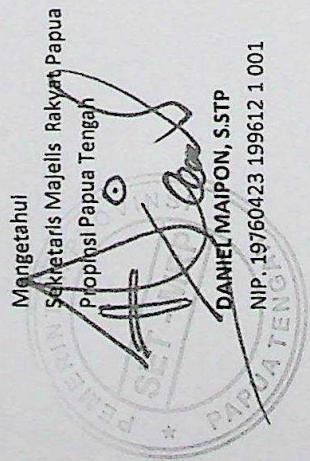
Nabire, 20 Desember 2023

Bendahara Pengeluaran

MARYAM NGANGUN
NIP. 197708042008012025

DAFTAR HONOR TENAGA AHLI
MAJELIS RAKYAT PAPUA PROPINSI PAPUA TENGAH
BULAN OKTOBER, NOPEMBER DAN DESEMBER TAHUN 2023

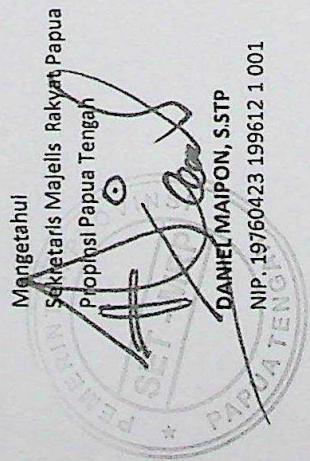
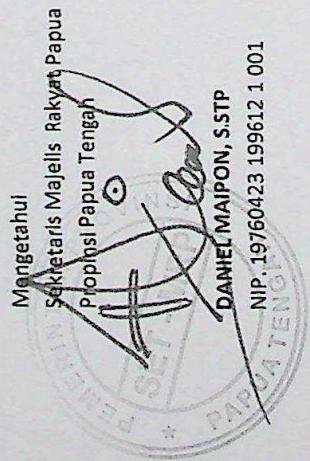
NO	NAMA	JUMLAH BULAN	JUMLAH PER BULAN	JUMLAH	PPH 5% & 15 %	JUMLAH YANG DITERIMA	TANDATANGAN	NO REKENING
1	MENASE YOTENI, SH	3	10,000,000	30,000,000	1,500,000	28,500,000	1	9000201106562
2	JORAM WAMBRAUW, SH, M.HUM.	2	10,000,000	20,000,000	1,000,000	19,000,000	2	1020201019235
3	DR. ANDREAS GOO	3	10,000,000	30,000,000	1,500,000	28,500,000	3	1100202033033
4	BENYAMIN KARETH, SH.	3	10,000,000	30,000,000	1,500,000	28,500,000	4	9000201035201
5	YERMIAS BINDOSANO, SH.	3	10,000,000	30,000,000	4,500,000	25,500,000	5	9000201262196
6	YOHANES WANAHAN	3	10,000,000	30,000,000	1,500,000	28,500,000	6	9000201132613
			60,000,000	170,000,000	11,500,000	158,500,000		



Nabire, 04 - 12 - 2023

Bendahara

MARYAM NGANGUN
NIP. 19770804 200801 2 025





PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH
SEKRETARIAT MAJELIS RAKYAT PAPUA

Jl. Mandala Kelurahan Bumi wonorejo Nabire – Papua Tengah

KEPUTUSAN SEKRETARIS MAJELIS RAKYAT PAPUA
NOMOR: 814.4 / /SET MRP-PPT

**TENTANG
PENGANGKATAN TENAGA AHLI
PADA
MAJELIS RAKYAT PAPUA PROVINSI PAPUA TENGAH**

SEKRETARIS MAJELIS RAKYAT PAPUA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mendukung kelancaran dan efektivitas pelaksanaan tugas dan wewenang serta hak dan kewajiban Majlis Rakyat Papua Provinsi Papua Tengah dipandang perlu mengangkat Tenaga Ahli yang bertugas mendampingi Pimpinan dan Anggota Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Tengah;
b. bahwa pengangkatan Tenaga Ahli Sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Sekretaris Majelis Rakyat Papua.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua;
3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004 tentang Majelis Rakyat Papua (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4461) sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004 tentang Majelis Rakyat Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4900);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Majelis Rakyat Papua;
9. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Jumlah Keanggotaan Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Tengah (Berita Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2023 Nomor 9);
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.2.2-4321 Tahun 2023 tentang Pengesahan Pengangkatan Anggota Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Tengah Masa Jabatan Tahun 2023-2028;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100.1.4-4231 Tahun 2023 Nomor 100.2.1.4-6097 Tahun 2023 tentang Pengesahan Pengangkatan Anggota Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Tengah Masa Jabatan Tahun 2023-2028;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100.2.2.2-4231 Tahun 2023 tentang Pengesahan Pengangkatan Anggota Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Tengah Masa Jabatan Tahun 2023-2028 Tanggal 26 Oktober 2023;

Memperhatikan : 1. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPA-OPD) Sekretariat Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2023; 2. Disposisi Sekretaris Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Tengah tertanggal 01 Oktober 2023 tentang Pengangkatan 6 (enam) Orang Tenaga Ahli pada Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2023;

M E M U T U S K A N

Menetapkan
KESATU : Mengangkat mereka yang namanya tersebut di bawah ini yaitu:
1. JORAM WAMBRAUW, SH, M.Hum
2. YOHAN WANAHAN
3. BENNY KARTEH, SH, M.Hum
4. ANDARIAS GOO, S.Sos, M.Si
5. MENASE YOTENI, SH
6. YERMIAS BINDOSANO, SH
Sebagai Tenaga Ahli pada Kantor Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Tengah.

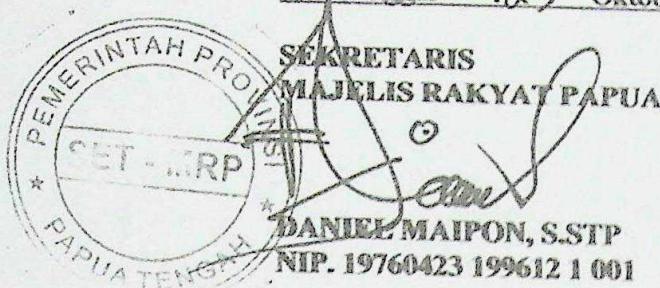
KEDUA : Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU mempunyai tugas:
1. Mendampingi dan membantu Pimpinan dan Anggota Majelis Rakyat Papua dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sehari-hari;
2. Menyusun telaahan, kajian dan analisis akademis terhadap isu dan permasalahan yang timbul dan berkaitan dengan perlindungan hak Orang Asli Papua;
3. Menyiapkan dan menyusun bahan untuk perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Majelis Rakyat Papua Tengah;

4. Memberikan saran dan pendapat sesuai keahlian kepada Pimpinan dan Anggota Majelis Rakyat Papua terkait isu perlindungan, pemberdayaan dan keberpihakan terhadap Orang Asli Papua;
5. Melaksanakan tugas lain sesuai hasil Rapat Pleno atau Keputusan Pimpinan Majelis Rakyat Papua;
6. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Pimpinan Majelis Rakyat Papua.

KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPA-OPD) Sekretariat Majelis Rakyat Tengah Tahun Anggaran 2023.

KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan terhitung mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Nabire
Pada tanggal : 25 Oktober 2023



Tembusan disampaikan kepada yth:

1. Para Pimpinan Majelis Rakyat Papua Prov. Papua Tengah;
2. Para Ketua – Ketua Pokja dan Alat Kelengkapan MRP Prov. Papua Tengah;
3. Para Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat MRP Prov. Papua Tengah;
4. Bendahara Pengeluaran Sekretariat MRP Prov. Papua Tengah;
5. Bendahara Gaji Sekretariat MRP Prov. Papua Tengah;
6. Yang Bersangkutan.